Artikel

Kerukunan dan Keberagaman dalam Masyarakat yang Berbhineka di Yogyakarta: Analisa Situasi dan Kebijakan di Desa Baleharjo dan Sinduadi

Target Jurnal: Al-Qalam (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar)

Disusun oleh:

Muh Ulil Absor, S.H.I, MA
Dr. Asep Jahidin, M.Si
Dr. Muqowim, S.Ag., M.Si
Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M
Achmad Zuhri, M.I.Kom
Proborini Hastuti, M.H

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2021

Kerukunan dan Keberagaman dalam Masyarakat yang Berbhineka di Yogyakarta: Analisa Situasi dan Kebijakan di Desa Baleharjo dan Sinduadi

Abstract

Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem) dan berkembangnya klaim kebenaran subyektif yang memaksakan kehendak atas tafsir agama menjadi dasar utama perlunya cara pandang yang moderat dalam beragama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis situasi kerukunan, pengalaman diskriminasi berbasis agama dan tingkat kesukaan terhadap kelompok tertentu serta menjelaskan sikap dan cara pandang beragama masyarakat. Penelitian ini dilakukan di daerah perkotaan yang multikultur di Propinsi DI Yogyakarta yaitu Kalurahan Baleharjo dan Sinduadi. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum responden yang mengalami diskriminasi karena agama dan konflik atau gesekan dalam masyarakat sangat minim. Namun, 10.2 % responden melaporkan pernah terjadi gesekan dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan sikap dan cara pandang masyarakat terkait komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan dan akomodatif terhadap budaya local dapat dikelompokkandalam kategori tinggi atau baik. Namun ada beberapa aspek moderasi beragama yang perlu dikuatkan seperti sikap tentang pentingnya penyelesaian masalah melalui jalur hukum jika terjadi persoalan dengan agama yang lain, penerimaan terhadap pendirian rumah ibadah agama lain, pemimpin dari agama lain dan keinginan untuk melakukan aksi demonstrasi dan mengusir kelompok yang dianggap menyimpang.

Keywords: Moderasi beragama, toleransi, kerukunan, daerah perkotaan dan diskriminasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama. Islam sebagai agama mayoritas (sekitar 87 % dari total penduduk/208 juta) juga menampilkan varian ekspresi keislaman yang beragam juga. Keragaman tersebut terlihat dalam berbagai aspek seperti pemikiran, mazhab, keorganisasian dan politik. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan dan berkah yang dimiliki Indonesia. Namun disaat yang sama kebhinekaan tersebut terkadang berpotensi memunculkan gesekan-gesekan, ketegangan, kekerasan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama atau bahkan internal umat beragama jika kemajemukan masyarakat tersebut tidak dikelola dengan baik. Wahid Institute

misalnya, melaporkan pada tahun 2013 terjadi 21,945 kasus intoleransi di Indonesia seperti kekerasan terhadap pengikut Syi'ah (Wahid, 2014).

Di samping itu, berbagai rentetan kekerasan mulai dari ancaman pemenggalan; kekerasan terhadap kelompok minoritas; konflik antar atau intra agama; perusakan rumah dan tempat ibadah; bom bunuh diri di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan semakin ekslusifnya sikap dan prilaku beragama masyarakat. Kecendrungan eksclusifisme pada sekelompok masyarakat tersebut juga ditunjukkan dengan menurunnya indeks kerukunan ummat beragama dari 73.8 pada tahun 2019 (Dzulfaroh, 2019) menjadi 67.5 tahun 2020 (Indikator, 2020). Varshney, Tadjoeddin, and Panggabean (2004) menemukan bahwa pola persebaran kekerasan kolektif di Indonesia berdasarkan pemberitaan media massa sepanjang 1990-2003 terjadi 4,270 total insiden kekerasan di seluruh Indonesia. Tingginya insiden konflik keagamaan tersebut dikuatkan dengan temuan survey dari LSI Denny JA bahwa dalam waktu 13 tahun, pendukung Pancasila menurun 10 %, dari 85% di tahun 2005 menjadi 75 % di tahun 2018 (LSI Denny JA, 2018). Penurunan index kerukunan umat beragama dan kasus-kasus kekerasan atas nama agama menunjukkan masalah intoleransi dan kerukunan antar umat beragama menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia.

Daerah perkotaan dengan tingkat penduduk yang padat menjadi daerah dengan tingkat insiden konflik keagamaan tertinggi dibandingkan wilayah lain (Panggabean, Alam, & Ali-Fauzi, 2010). Daerah perkotaan termasuk daerah rentan terjadi kasus-kasus kerukunan disebabkan daerah perkotaan menjadi "melting spot" tempat bertemunya berbagai macam latar belakang budaya, etnis dan agama. Daerah perkotaan juga menjadi tujuan migrasi dari desa baik untuk tujuan bekerja maupun untuk pendidikan. Daerah perkotaan sebagai daerah tujuan pendidikan juga menarik mahasiswa untuk belajar dan mahasiswa termasuk salah satu kelompok yang paling rentan terpapar dengan faham radikalisme dan ekslusivisme. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Inteligen Negara (BIN), misalnya menemukan bahwa kampus sudah menjadi target kaum radikal untuk didoktrin dan dari tiga perguruan tinggi yang diteliti ditemukan sekitar 39 % mahasiswa terpapar faham radikalisme (Antara, 2018). Disamping itu, Penelitian Alvara Research Center dan Mata Air Production (2017) dengan melibatkan 1,800 mahasiswa di seluruh Indonesia menemukan bahwa 23,5% setuju mendukung gerakan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan 16,8% menyatakan bahwa idiologi yang cocok bagi indonesia adalah idiologi islam, bukan pancasila. 17,8% mahasiswa berpendapat bentuk ideal pemerintah Negara Kesatuan Indonesia adalah Khilafah dan

sekurang-kurangnya 23,5% siap melakukan jihad untuk mewujudkan negara berbasis khilafah.

Yogyakarta termasuk propinsi yang menjadi propinsi “melting spot” berbagai agama, suku dan budaya. Sebagai daerah melting spot dari beragam latar belakang yang berbeda, Yogyakarta termasuk daerah rawan terjadi masalah-masalah kerukunan. Setara Institute (2009) misalnya melaporkan Yogyakarta termasuk dalam 10 Propinsi yang memiliki kasus kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) tertingi di Indonesia. Beberapa kasus KBB yang terjadi di Yogyakarta diantaranya penolakan pendatang non-muslim, pembubaran upacara doa keagamaan, pembubaran sedekah laut dan pengrusakan makam. Penelitian ini akan dilakukan di dua desa/kalurahan multikultur di daerah perkotaan di Yogyakarta yaitu kalurahan Baleharjo dan kalurahan Sinduadi.

Penelitian tentang radikalisme dan kerukunan di Indonesia sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian banyak yang memfokuskan pada situasi keterpaparan masyarakat Indonesia dengan radikalisme. Alvara Research Center (2017), misalnya, menemukan bahwa 19.4 % Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18.1 % pegawai swasta, 9.1 % pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak setuju Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi Indonesia. Hal senada juga ditunjukkan dengan persetujuan terhadap konsep khilafah dimana 22.2 % PNS, 17 % pegawai swasta dan 10.3 % pegawai BUMN setuju dengan konsep khilafah. Disamping itu,

Untuk mewujudkan masyarakat yang rukun dan menangkal radikalisme, salah satu program unggulan Kementerian Agama adalah program “Desa Sadar Kerukunan” yang dimulai sejak tahun 2017. Di awal pelaksanaan program, sejumlah 34 desa, masing-masing propinsi menetapkan 1 desa sebagai desa sadar kerukunan (Az & Adnan, 2020). Program desa sadar kerukunan berbentuk penghargaan kepada desa-desa multikultur yang berhasil menjaga kerukunan dan keharmonisan antar anggota masyarakatnya. Az and Adnan (2020) dalam penelitiannya mengkaji model civic engagement dapat membangun consensus perdamaian di desa sadar kerukunan di kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa serta model integrasi elit dalam implementasi pembinaan desa sadar kerukunan. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan keseharian dan adanya komunitas interkomunal sangat berperan dalam membangun consensus perdamaian. Temuan serupa ditemukan oleh Noorbani (2019) bahwa kondisi damai dalam hubungan umat beragama di Kampung Sawah merupakan hasil aktivisme yang sudah berlangsung sejak awal kampung sawah dibangun. Faktor ikatan

kekerabatan, peran tokoh agama dan masyarakat dan modal sosial menjadikan kampung sawah selalu terjaga dalam kondisi rukun.

Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak memfokuskan kajiannya pada persentase kelompok yang terpapar radikalisme dan faktor-faktor yang mendukung terwujudnya kerukunan dalam masyarakat. Belum banyak penelitian yang mengkaji kerukunan dan moderasi beragama di masyarakat yang multikultur di Yogyakarta. Disamping itu, belum ada kajian yang komprehensif yang mengkaji atau melakukan modelling tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pandangan, sikap dan prilaku moderat dan ekslusif/pro opini radikalisme di kalangan masyarakat. Penelitian yang mengkaji pengalaman ekslusi social atau diskriminasi berdasarkan agama yang dianut.

Pembahasan dalam artikel ini memiliki tiga tujuan yaitu pertama bertujuan untuk menganalisis situasi kerukunan, pengalaman diskriminasi berbasis agama dan tingkat kesukaan terhadap kelompok tertentu. Tujuan kedua adalah menjelaskan sikap dan cara pandang keberagamaan masyarakat. Sikap dan cara pandang keberagamaan masyarakat akan diukur dengan indikator moderasi beragama yang sudah dikembangkan Kementerian Agama yang mencakup empat dimensi yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya local. Tujuan yang ketiga adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap beragama yang moderat.

Fokus penelitian ini adalah pandangan, sikap dan prilaku moderat, ekslusif/opini pro radikalisme di masyarakat. Peneliti akan menggunakan teori dan alat ukur yang beragam untuk mendefinisikan secara operasional prilaku moderat dan ekslusif/pro radikalisme dengan tujuan untuk melihat konsistensi dan validitas hasil penelitian. Pertama, peneliti akan menggunakan perspektif moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama. Kementerian agama (2009) mendefinisikan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kementerian Agama menetapkan ada empat indikator moderasi beragama yang mencakup: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Penelitian yang dilakukan PPIM UIN Syarif Hidayatullah (2020) menemukan bahwa indikator komitmen kebangsaan, toleransi dan anti kekerasan bisa digunakan untuk memprediksi opini pro radikalisme.

Untuk mengukur prilaku dan sikap moderat, peneliti akan membuat indeks moderasi beragama berdasarkan empat dimensi tersebut. Dimensi pertama adalah komitmen kebangsaan. Peneliti akan menggunakan teori Blasko, et al. (2018) untuk merumuskan indikator komitmen kebangsaan yang meliputi keercayaan terhadap pemerintah, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), pengakuan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Empat Puluh Lima (UUD 1945), ketatan terhadap konstitusi, aturan hukum dan kesepakatan bersama, tanggungjawab sebagai warga negara dan partisipasi dalam pemilu. Dimensi kedua adalah toleransi. Sikap toleransi akan diukur dengan persepsi masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah agama lain, penganut agama lain atau orang dari kelompok lain (seperti pendatang, beda suku atau etnis) menjadi pejabat publik, perayaan keagamaan agama lain, berteman dengan penganut agama lain atau orang dengan latar belakang berbeda, mengucapkan selamat hari raya ke agama lain, bertetangga dengan penganut agama lain dan memakamkan penganut agama lain. Dimensi ketiga adalah anti kekerasan yang akan diukur dengan sikap dan prilaku anti kekerasan seperti ketidaksetujuan menegakkan syariat islam dengan kekerasan, hate speech dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dimensi yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal yang diukur dengan menerima keberagaman sebagai anugerah dan penghargaan terhadap kearifan dan budaya lokal.

Sedangkan untuk mengukur opini pro radical atau eksklusif, peneliti akan menggunakan teori extremism yang dikembangkan oleh the Asia Foundation. The Asia foundation menjelaskan bahwa radikalisme dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu kekerasan fisik dan non-fisik (seperti hate speech, intimidasi terhadap kelompok minoritas dan pawai dari kelompok extremist). The Asia foundation membagi radikalisme menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif dapat berbentuk dukungan materi dan dukungan terhadap ideologi extremist. Dukungan materi diukur dengan berpartisipasi aktif dalam kerusuhan dan memberikan bantuan keuangan atau barang. Sedangkan mendukung secara ideologi diukur dengan menyebarluaskan propaganda radikalisme dan mendukung tujuan kelompok radikal. Sedangkan partisipasi pasif diukur dengan penolakan memberikan informasi kepada pihak berwenang terkait aktivitas radikalisme dan menolak kebebasan melaksanakan ajaran agama. The asia foundation juga menggunakan parameter pemahaman terhadap jihad sebagai salah satu indikator extremisme. Persetujuan menggunakan kekerasan adalah komponen penting dalam berjihad adalah dalah satu indikator extremisme. Peneliti juga akan menggunakan parameter persetujuan untuk mendirikan negara islam dan menegakkan syariat islam dengan kekerasan, persetujuan untuk menggunakan kekerasan

dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar dan persetujuan untuk kembali ke piagam Jakarta sebagai indikator sikap dan prilaku radikalisme.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (pendekatan campuran). Mixed method didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang mengkombinasikan metode, konsep, pendekatan dan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Metode kualitatif dianggap pendekatan yang tepat dalam mengeksplorasi persepsi individu atau masyarakat secara mendalam yang sangat relevan dengan penelitian ini khususnya dalam menganalisis perspektif masyarakat tentang sikap dan prilaku moderat dan ekslusif dan model deteksi dini dan penanganan kasus-kasus kerukunan di masyarakat (Grbich, 2012). Penelitian kualitatif menggunakan penalaran induktif yang menekankan pada pengumpulan informasi atau data berupa kasus-kasus untuk melihat pattern atau pola yang selanjutnya pola tersebut diabstraksikan menjadi sebuah teori. Untuk menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisa tematik (thematic analysis) dengan menganalisa pola dan tema-tema yang muncul dalam data (Douglas, 2002; Liamputtong & Ezzy, 2005). Disamping itu, pendekatan kuantitatif juga dianggap tepat dalam menganalisa situasi dan korelasi antar variable. Pendekatan kuantitatif sering didefinisiakan sebagai penelusuran atau kajian yang sistematik dan ilmiah tentang data dan korelasi antar data (Cohen, Manion, & Morrison, 2004). Salah satu kelebihan pendekatan kuantitatif adalah dapat membuat generalisasi untuk keseluruhan populasi.

Ada dua Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam dan survey. Pengumpulan data yang pertama adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam dianggap sebagai metode yang tepat untuk mendalami kehidupan dan situasi sehari-hari dari sekelompok masyarakat serta memahami kebiasaan masyarakat dalam konteks yang lebih luas (De Vaus, 2002). Wawancara mendalam juga dipandang metode yang tepat untuk menggali pengalaman masyarakat secara mendalam khususnya dalam mempromosikan moderasi beragama (Grbich, 2012). Wawancara mendalam akan dilakukan terhadap terhadap key informan dengan menggunakan metode wawancara semi terstuktur (semi-structured interview). Pertanyaan-pertanyaan terbuka (Open-ended questions) akan digunakan untuk menggali pengalaman masyarakat terkait topik yang akan diteliti (Minichiello, Aroni, Timewell, & Alexander, 1995). Pertanyaan-pertanyaan terbuka sangat strategis dalam pengumpulan data kualitatif dengan mendorong

informan untuk berbagi informasi secara terbuka, menyampaikan pendapat secara bebas dan memberi kemudahan kepada peneliti untuk menggali informasi lanjutan secara lebih mendalam ketika dibutuhkan (Drummond, 2005; Henn, Weinstein, & Foard, 2005). Pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan bersifat flexible dan dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Disamping itu, peneliti juga akan menggunakan bahasa non-verbal melalui kontak mata dan bahasa tubuh sehingga informan merasa nyaman dan terdorong untuk mengungkapkan pendapat dan pengalaman hidupnya.

Untuk memilih informan, peneliti menggunakan purposive sampling dengan memilih informan yang kaya informasi terkait topik yang akan diteliti (Babbie, 2015). Peneliti dapat menggunakan justifikasi kayanya informasi dari informan dalam menseleksi informan dalam studi ini (Neuman, 2011). Tujuan penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu kepada informan sebelum wawancara dilakukan. Peneliti juga menjelaskan penggunakaan data hanya untuk kepentingan akademik dan kerahasiaan identitas informan akan dijaga.

Wawancara secara mendalam dilakukan terhadap dua kelompok informan. Kelompok pertama adalah wawancara secara mendalam kepada aparat desa seperti kepala desa, tokoh masyarakat dan pengelola desa sadar kerukunan. Kelompok kedua adalah instansi pemerintah khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi institusi lain yang mempunyai perhatian terhadap kerukunan umat beragama seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah survey. Penelitian ini mensurvey pandangan dan prilaku moderat dan radikal di masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah exploratif sehingga tidak menggunakan teknik sampling yang sistematis dan tidak dapat digeneralisis untuk keseluruhan populasi. Pemilihan sifat penelitian menjadi explorative disebabkan terbatasnya waktu pengumpulan data dan situasi Covid-19 yang menyulitkan peneliti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Jadi, survei ini akan mengumpulkan data dari rumah tangga yang artinya masing-masing rumah tangga akan diwawancara 1 orang sebagai perwakilan rumah tangga. Di dua kalurahan yang diteliti terdapat 13,049 rumah tangga. Dengan margin of error 6 % dan dengan tingkat kepercayaan 95 %, dari total populasi rumah tangga diambil sample sejumlah 260 orang, masing-masing Kalurahan berjumlah 130 orang dari 130 rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan di dua desa multikultur di daerah perkotaan di Provinsi DIY. Pemilihan kedua kalurahan/desa ditentukan secara purposive dengan kriteria daerah perkotaan multikultur yang terdiri dari minimal lima agama. Penelitian ini akan membandingkan desa/kelurahan multikultur yang sudah mendapatkan penghargaan sebagai desa moderasi beragama dan sadar kerukunan dengan desa multikultur lainnya. Berdasar pertimbangan tersebut, maka penelitian ini menggambil lokasi di desa Baleharjo di Kota Wonosari (mendapatkan penghargaan desa moderasi dan sadar kerukunan) dan desa Sinduadi Kecamatan Mlati Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gambar 1: Lokasi masjid di pinggir jalan yang bersebelahan dengan gereja di Kalurahan Baleharjo

Desa pertama adalah desa Baleharjo di Kota Wonosari yang mendapatkan penghargaan atau dicanangkan sebagai desa moderasi dan sadar kerukunan oleh Kementerian Agama. Jumlah penduduk di Kalurahan Baleharjo adalah 6.830 (3.189 laki-laki dan 3.241 perempuan) pada tahun 2019 sedangkan jumlah rumah tangga adalah 1.565 rumah tangga. Di Kalurahan Baleharjo terdapat 5 dusun yaitu dusun Purwosari, Mulyosari, Rejosari, Wukirsari dan Gedangsari. Berdasarkan data dari PODES 2014, terdapat 5 agama yang dianut oleh

masyarakat di Kalurahan Baleharjo melingkupi agama islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Jumlah penduduk muslim adalah yang terbanyak diikuti oleh pemeluk agama Katolik dan Kristen. Sebaran penduduk yang beragama berbeda di 5 dusun tersebut hampir merata sehingga lokasi studi difokuskan di 5 dusun dengan mengambil sampel 26 orang masing-masing dusun. Di Kalurahan Baleharjo terdapat 11 masjid dan 3 gereja bahkan ada masjid yang bersebelahan dengan gereja. Gambar 1 menggambarkan lokasi masjid yang berdekatan dengan gereja.

Kedua adalah Kalurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Jumlah penduduk di Kalurahan Sinduadi hampir 7 kali lipat jumlah penduduk Kalurahan Baleharjo yaitu berjumlah 34.421 jiwa (17.172 laki-laki dan 17.249 perempuan). Jumlah penduduk di Kalurahan Sinduadi adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan Kalurahan lain yang ada di Kecamatan Mlati. Jumlah tersebut disebabkan oleh lokasi Sinduadi yang berada di daerah perkotaan yang menjadi pusat ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Terdapat 1 perguruan tinggi negeri (UGM) dan 2 perguruan tinggi swasta yang ada di Sinduadi. Lokasi Sinduadi yang berdekatan dengan RS Sardjito dan UGM dapat mencerminkan strategisnya lokasi Kalurahan Sinduadi sehingga penduduknya cukup banyak jika bandingkan dengan Kalurahan yang lain. Bahkan pendatang dari mahasiswa sangat banyak yang berjumlah hampir setengah dari penduduk Sinduadi tersebut. Adapun jumlah rumah tangga di Kalurahan Sinduadi adalah 11.484 rumah tangga. Kalurahan Sinduadi terdiri dari 18 dusun, namun dusun yang paling beragam dari sisi agama adalah dusun Karangjati dan Gemawang sehingga survey ini difokuskan di dua dusun tersebut. Masing-masing dusun dikumpulkan 65 responden dari 65 rumah tangga mulai usia 16 tahun keatas.

Penduduk di Kalurahan Sinduadi memeluk berbagai macam agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. 80% lebih penduduk Sinduadi memeluk agama islam. Jumlah rumah ibadah di Kalurahan Sinduadi juga sangat beragam yang terdiri dari 53 masjid, 1 gereja katolik, 3 gereja Kristen dan 1 Vihara.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Respondent

Jenis Kelamin

Gambar 2 mendeskripsikan persentase responden berdasarkan jenis kelamin. Jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu 53% jika dibandingkan dengan responden perempuan yaitu 47%. Hal tersebut disebabkan karena resonden dalam penelitian ini berdasarkan rumah tangga sehingga kecenderungannya kepala keluarga yang menjawab pertanyaan ketika survey dilakukan dan kepala keluarga cenderung laki-laki. Namun selisih persentase tersebut tidaklah significant.

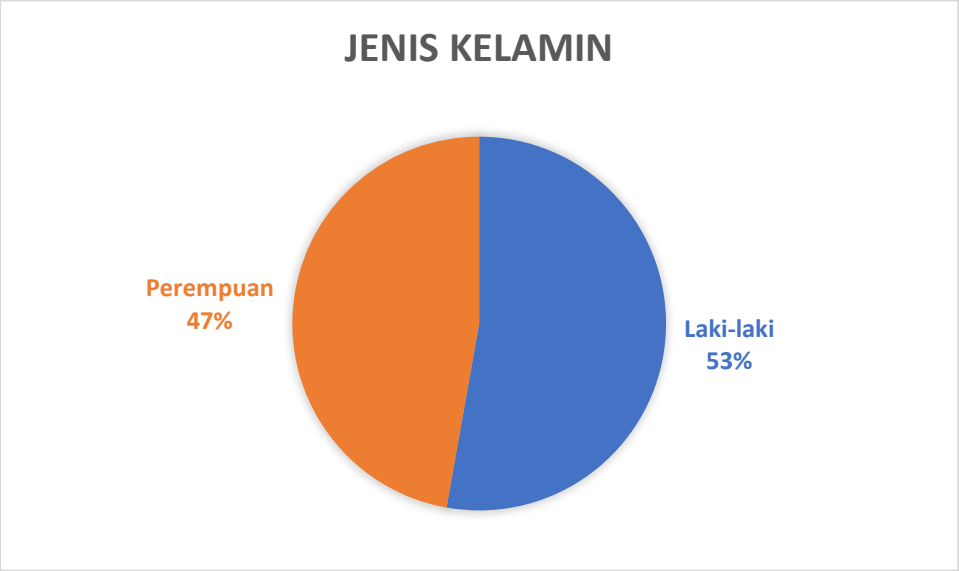

Gambar 2: Persentase responden berdasarkan jenis kelamin di kedua Kalurahan

Kelompok Umur

Responden penelitian dibagi menjadi empat kelompok umur berdasarkan generasi yaitu generasi Z (umur 16 – 23 tahun), generasi milenial (usia 24 – 39 tahun), generasi X (usia 40 – 59 tahun) dan lanjut usia (60 tahun keatas). Gambar 3 menjelaskan persentase responden berdasarkan kelompok umur tersebut. Gambar 3 menggambarkan bahwasanya mayoritas responden adalah generasi X atau responden yang berusia 40 sampai 59 tahun yang berjumlah 55 %, diikuti oleh generasi milenial sejumlah 23 % dan lansia sejumlah 17 %. Adapun generasi Z memiliki persentase paling sedikit sejumlah 5 % dari total populasi.

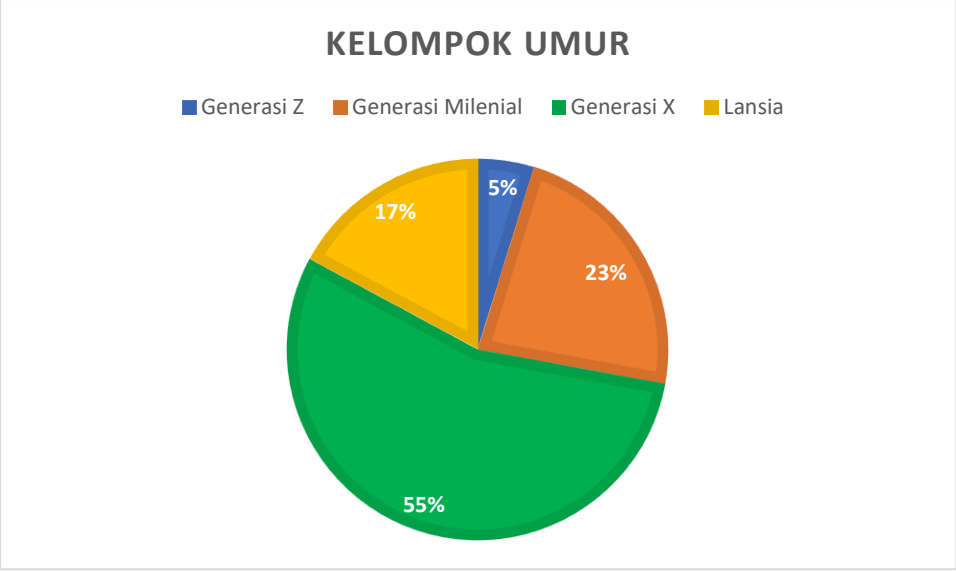

Gembar 3: Persentase responden berdasarkan kelompok umur

Status Pernikahan

Gambar 4 menggambarkan persentase status pernikahan responden di lokasi penelitian. Mayoritas responden berstatus menikah yaitu sejumlah 78 %. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah berkeluarga sedangkan persentase responden yang belum menikah adalah 14 %, berstatus janda atau duda 5 % dan bersatatus bercerai 3%.

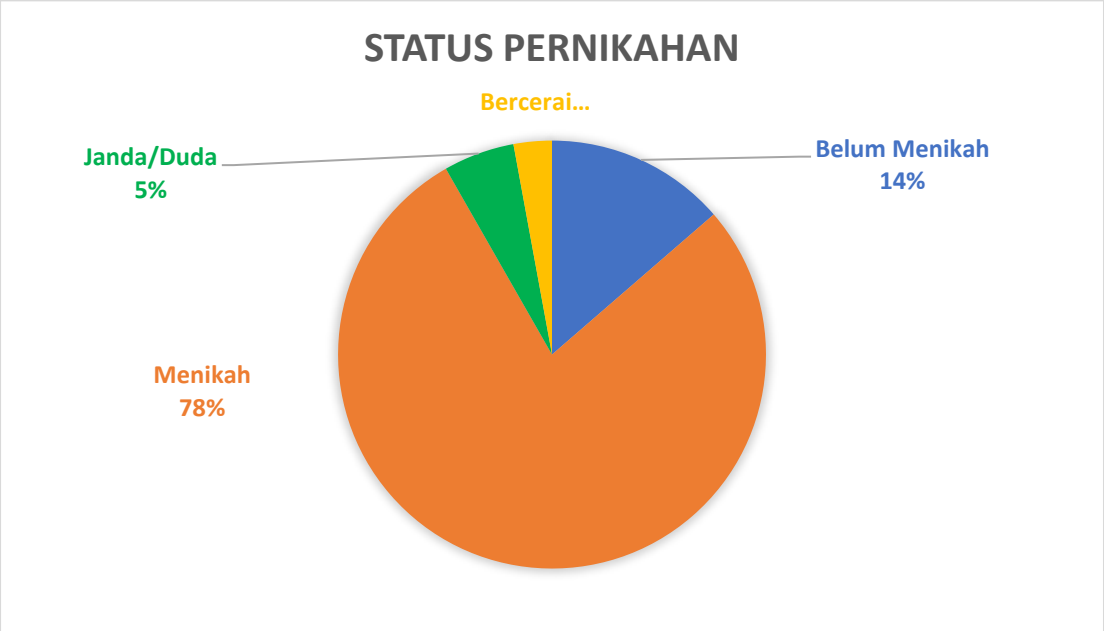

Gambar 4: Persentase responden berdasarkan status pernikahan

Agama

Gambar 5 menggambarkan komposisi agama di daerah penelitian dimana mayoritas responden (69%) beragama islam, diikuti oleh responden yang beragama Katolik sejumlah 21 % dan Kristen sejumlah 9 %. Adapun persentase responden yang beragama Hindu adalah yang paling sedikit yaitu 1%.

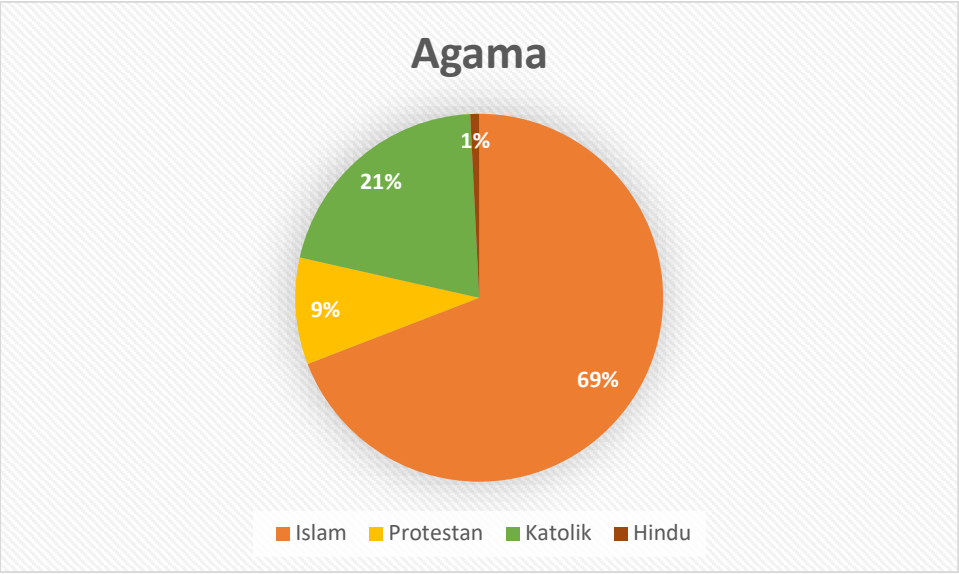

Gambar 5: Persentase responden berdasarkan agama yang dianut

Pendidikan

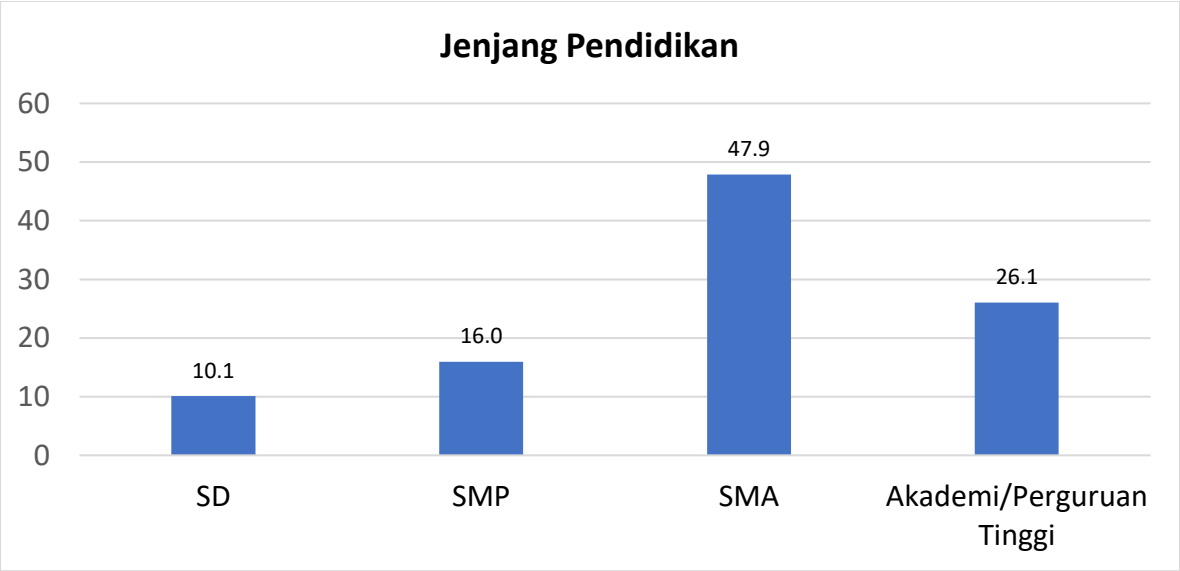

Gambar 6: Persentase responden berdasarkan jenjang pendidikan yang diselesaikan

Gambar 6 menggambarkan jenjang pendidikan responden. Hampir setengah responden (47.9%) melaporkan telah menyelesaikan pendidikan SMA yang diikuti oleh responden yang menyelesaikan perguruan tinggi sejumlah 26.1 %. Hal ini menunjukkanbahwasanya kebanyakan responden adalah masyarakat yang terdidik. Hal tersebut juga menunjukkan bahwasanya kedua lokasi adalah daerah urban atau perkotaan yang cenderung memiliki pendidikan yang tinggi. Hanya 16 % saja responden yang menyelesaiakan jenjang pendidikan SMP dan 10 % yang hanya menyelesaikan jenjang pendidikan SD.

Pekerjaan

Gambar 7 menggambarkan bahwasanya mayoritas (68 %) responden di lokasi penelitian berstatus sedang bekerja sedangkan sisanya sedang tidak bekerja dan dalam usia pensiun. Kebanyakan responden bekerja sebagai wirausahawan, bekerja di perusahaan dan di instansi pemerintah. Mayoritas responden bekerja di sektor perdagangan, jasa dan pelayanan publik. Hanya sedikit sekali responden yang bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan kedua lokasi penelitian adalah daerah perkotaan. Disamping itu rata-rata penghasilan individu responden selama sebulan adalah Rp 2,228,000.

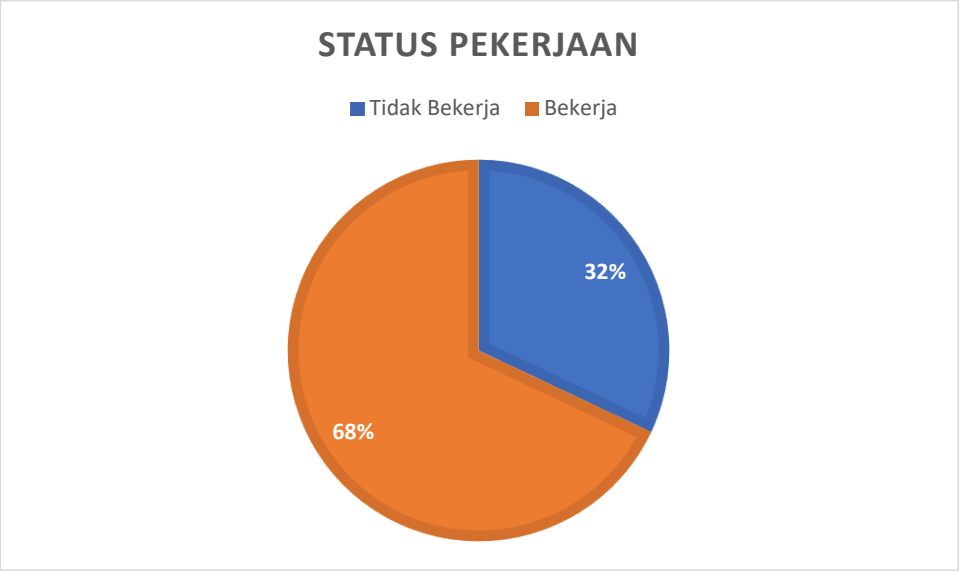

Gambar 7: Persentase responden berdasarkan status pekerjaan saat ini

Status Sosial Ekonomi

Gambar 8 menggambarkan status sosial ekonomi responden. Status sosial ekonomi responden diukur dengan persepsi responden atas kondisi keuangan responden berdasarkan kebutuhan sehari hari yang dikategorikan menjadi lima yaitu kondisi ekonomi yang sangat baik (sangat kaya), baik (kaya), cukup (sedang), kurang (miskin) dan sangat kurang (sangat

miskin). Mayoritas responden (40.5%) melaporkan kondisi ekonomi keluarga dalam kondisi cukup, diikuti oleh responden yang memiliki situasi ekonomi dalam kondisi baik (34.1%), kurang baik (21%), sangat kurang (2.4%) dan sangat baik 2 %.

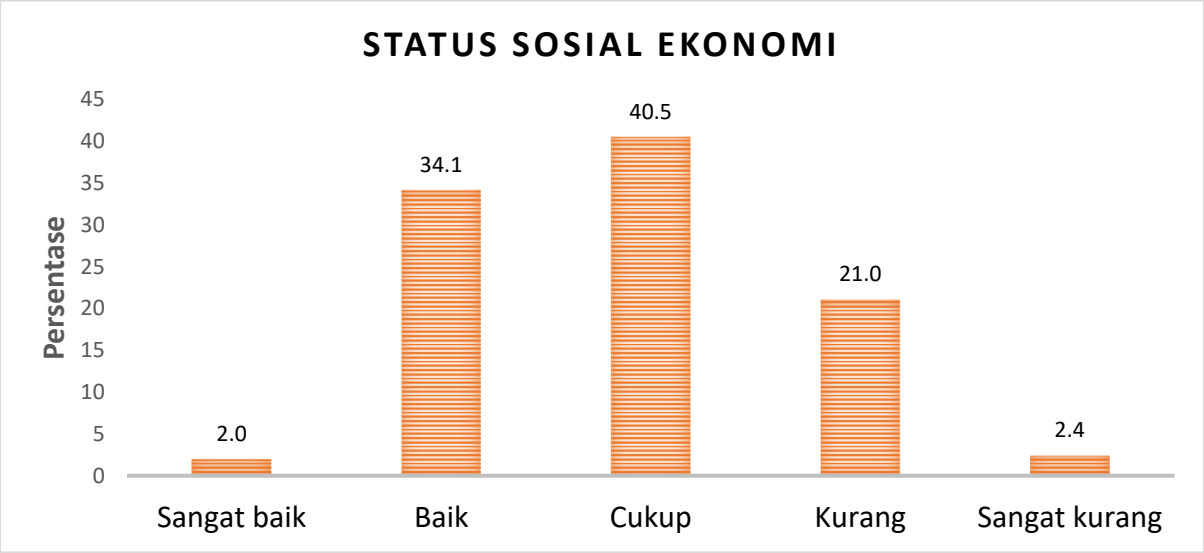

Gambar 8: Persentase responden berdasarkan status sosial ekonomi

Kondisi Kerukunan, Ketidaksukaan dan Diskriminasi

Gambar 9: Persepsi masyarakat tentang situasi kerukunan di Indonesia

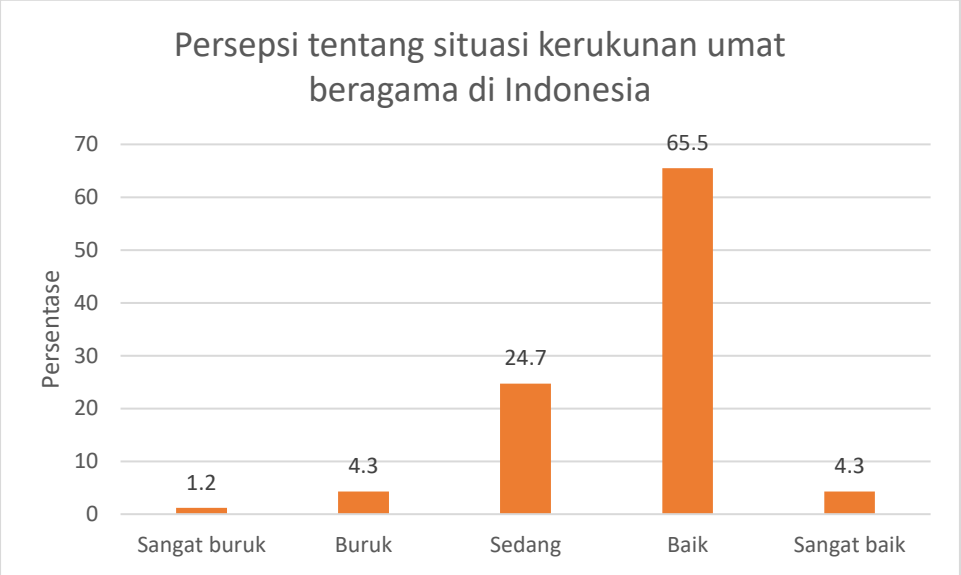

Keragaman agama adalah keniscayaan di Indonesia. Keragaman tersebut adalah berkah jika dapat dikelola dengan baik. Namun disaat yang bersamaan, keragaman tersebut dapat memunculkan konflik dan benturan dalam masyarakat. Gambar 9 menggambarkan bahwa mayoritas responden (65.5 %) berpendapat bahwa situasi kerukunan di Indonesia dalam kondisi baik, diikuti dengan responden yang melaporkan situasi kerukunan dalam kondisi sedang (24.7%) dan sangat baik 4.3%). Sebaliknya, ada sekelompok kecil responden yang berpendapat bahwa situasi kerukunan di Indonesia buruk (4.3%) dan sangat buruk (1.2%). Persepsi masyarakat yang melihat situasi kerukunan dalam kondisi yang baik ini sejalan dengan indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2019 dan 2020 yang dalam kategori baik. Indeks kerukunan ummat beragama pada tahun 2019 adalah 73.8 dan 67.5 pada tahun 2020 (Dzulfaroh, 2019; Indikator, 2020). Hal inimenunjukkan bahwasanya Indonesia telah berhasil menunjukkan praktik beragama yang moderat dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gambar 10: Intensitas konflik atau gesekan antar umat beragama di masyarakat

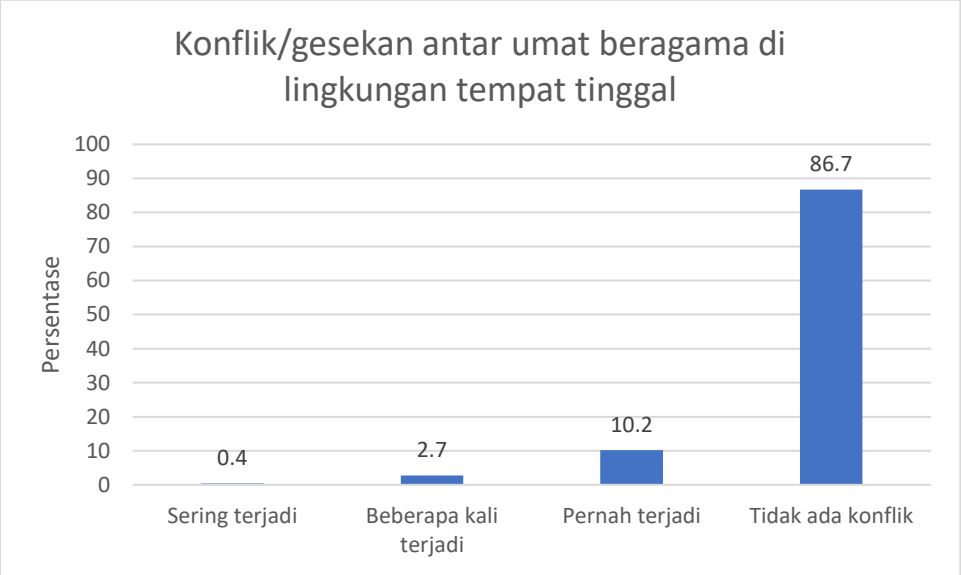

Untuk mengetahui situasi kerukunan di tingkat tempat tinggal, responden juga ditanya tentang intensitas gesekan atau konflik yang terjadi di sekitar tempat tinggal responden (Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah pernah terjadi gesekan atau konflik antar masyarakat yang terjadi di desa/kelurahan tempat tinggal Bapak/Ibu?). Gambar 10 menggambarkan bahwa mayoritas responden (86.7%) melaporkan tidak ada konflik atau gesekan dalam masyarakat terkait perbedaan agama. Namun, 10.2 % responden melaporkan di desa mereka pernah terjadi gesekan dalam masyarakat, 2.7 % responden melaporkan beberapa kali terjadi dan 0.4 % menyatakan sering terjadi. Angka tersebut cukup

mengkhawatirkan mengingat daerah perkotaan termasuk daerah rentan terjadi kasus-kasus kerukunan. Penleitian yang dilakukan oleh Panggabean, Alam, & Ali-Fauzi (2010) menemukan bahwa daerah perkotaan dengan tingkat penduduk yang padat menjadi daerah dengan tingkat insiden konflik keagamaan tertinggi dibandingkan wilayah lain.

Secara umum, dalam konteks Indonesia yang lebih luas, berbagai macam aksi intoleransi di Indonesia bukanlah persoalan agama tetapi persoalan relasi mayoritas minoritas. Penolakan pendirian rumah ibadah biasanya terjadi di daerah-daerah dimana sebuah agama menjadi agama mayoritas. Penolakan pendirian rumah ibadah di berbagai daerah seperti di Minahasa Utara, Papua dan Bogor menunjukkan persoalan mayoritarianisme tersebut. Penolakan pendirian musolla/masjid di Minahasa Utara tepatnya di desa Tumaluntung dengan alasan penduduk di lokasi adalah mayoritas Kristen dan kekhawatiran akan terganggu dengan suara bising dari azan sedangkan kalau mereka protes akan terancam pasal penistaan agama. Penolakan kegiatan yang dilakukan oleh gereja Katolik Paroki Santo Bapista Parung oleh mayoritas muslim di Bogor juga menunjukkan masalah mayoritas dan minoritas tersebut.

Sebagai bangsa yang beragam, ancaman disharmoni dan intoleransi memang selalu muncul setiap saat. Kasus-kasus kekerasan dan intoleransi sering disebabkan oleh ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu. Gambar 11 menggambarkan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu dengan skala 0-10. Semakin tinggi angkanya maka semakin disukai kelompok tersebut dan sebaliknya semakin rendah angkanya semakin tidak disukai kelompok tersebut. Gambar 10 menggambarkan bahwa kelompok yang paling disukai adalah orang islam dengan nilai rata-rata 8.8. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kesukaan terhadap muslim karena mayoritas responden (69 %) adalah muslim. Kecenderungannya, orang islam akan memberikan nilai yang tinggi atau menyukai muslim yang lain. Hal ini dibuktikan dengan kelompok yang paling disukai setelah muslim adalah suku jawa dengan skor 8.5. Mayoritas responden bersuku jawa. Kelomok yang paling disukai selanjutnya adalah suku Sunda (7.9), keturunan Arab (7.7), Penganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Rata-rata skor untuk Keturunan Tionghoa cukup tinggi yaitu 7.3 yang menunjukkan bahwasanya keturunan Tionghoa di lokasi penelitian disukai masyarakat.

Disamping kelompok yang disukai, ada enam kelompok yang dibawah nilai rata-rata (angka 5) yaitu kelompok ahmadiah, syiah, wahabi, ateis, komunis dan LGBT. Rata-rata dibawah 5 dapat diartikan adalah kelompok yang kurang disukai. Kelompok LGBT dan ateis

adalah kelompok yang paling tidak disukai dengan nilai rata-rata dibawah 1 sedangkan kelompok wahabi dan komunis juga termasuk yang kurang disukai dengan skor rata-rata di bawah dua. Kelompok selanjutnya yang kurang disukai adalah kelompok syiah dan ahmadiyah dengan nilai rata-rata 3.6 dan 4.6 secara berurutan. Angka tersebut dapat merefleksikan tingginya sikap intoleransi terhadap kelompok syiah dan ahmadiyah di Indonesia.

Ketidaksukaan terhadap suatu kelompok juga dapat berimplikasi terhadap sikap atau keinginan untuk memberikan bantuan terhadap kelompok tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh PPIM (2016) terhadap guru Pendidikan agama islam menemukan bahwa 80% responden tidak bersedia jika diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya. Sikap ini menunjukkan kelompok yang tidak disukai dapat terekslusi secara social dan terdiskriminasi dari akses dalam mendapatkan bantuan dari anggota masyarakat yang lain karena identitas keagamaan yang melekat pada diri mereka.

Gambar 11: Skor rata-rata kesukaan terhadap suatu kelompok

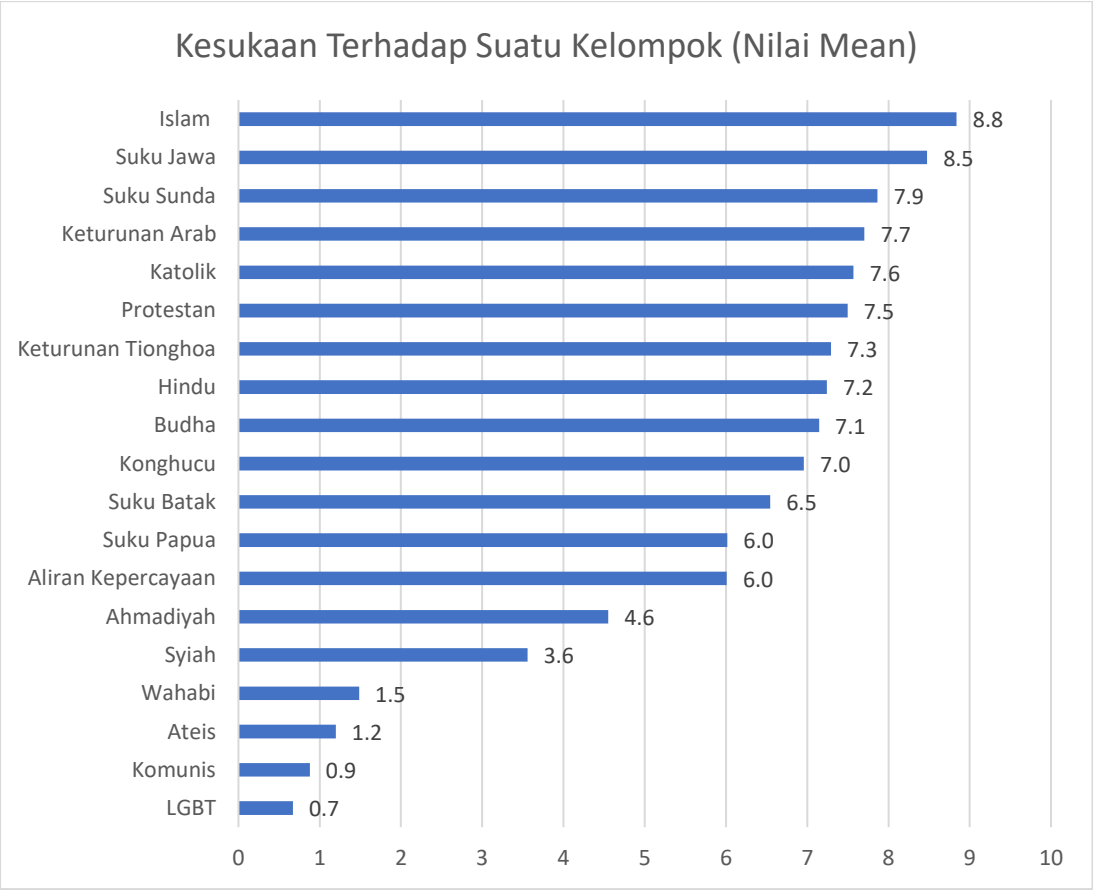

Secara umum diskriminasi didefinisikan sebagai perbedaan perlakukan, baik karena warna kulit, suku, jenis kelamin, ekonomi maupun agama. Salah satu bentuk diskriminasi

adalah perlakuan yang tidak berimbang dan adil atau dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Persoalan dominasi dari mayoritas juga menjadi keperhatinan dari responden. Salah seorang responden mengungkapkan bahwa persoalan sosial keagamaan yang terjadi di lingkungan mereka adalah "hegemoni mayoritas yang egois" dan egoisme "mayoritas". Sikap egoism mayoritas ini tercerminkan dari keluhan salah seorang responden yang melaporkan suara azan yang terlalu keras. Suara azan yang terlalu keras dengan menggunakan toa di beberapa daerah menjadi salah satu potensi yang dapat menyebabkan gesekan dalam masyarakat. Kasus Meiliana yang memprotes volume suara azan yang terlalu keras di Tanjung Balai Sumatra Utara dituntut atas penistaan agama di pengadilan dan divonis bersalah adalah potret bagaimana volume suara azan yang terlalu keras dapat memicu sikap intoleransi. Protes penolakan pendirian rumah ibadah (masjid) di Minahasa Utara dengan alasan khawatir suara azan yang terlalu keras akan mengganggu ketentraman masyarakat mayoritas non-muslim menguatkan bukti bahwa volume suara azan yang terlalu keras dapat menjadi faktor pemicu gesekan di masyarakat.

Diskriminasi juga dapat tercermin dalam akses terhadap layanan publik. Penelitian ini juga menggali informasi pengalaman responden dalam mengakses layanan publik seperti ketika menggunakan busana keagamaan, mengakses bantuan dari pemerintah, berurusan dengan poenegak hukum, berobat di layanan kesehatan, ketika mengurus dokumen kependudukan, di tempat kerja, di lingkungan sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Gambar 12 menggambarkan secara rinci diskriminasi yang dialami oleh responden dalam mengakses layanan publik. Secara umum responden yang mengalami diskriminasi karena agama yang dianutnya sangat sedikit dibawah 1.5 persen.

Diskriminasi yang paling tinggi dialami oleh responden dalam memperoleh bantuan dari pemerintah, ketika berurusan dengan penegak hukum dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing 1.2 persen. Diskriminasi yang paling sedikit dilaporkan responden (0.4 %) adalah ketika menggunakan busana keagamaan, ketika berobat di layanan kesehatan dan ditempat kerja atau ketika melamar pekerjaan.

Sedikitnya responden yang mengalami diskriminasi berbasis agama menunjukkan bahwasanya Indonesia termasuk negara yang sangat baik dalam mengelola perbedaan. Namun, meskipun hanya sedikit sekali masyarakat yang mengalami diskriminasi, pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian yang lebih sehingga diskriminasi berbasis agama bisa dihilangkan di Indonesia.

Gambar 12: pengalaman mendapat perlakuan diskriminatif dalam mengakses layanan publik dan kehidupan sehari-hari

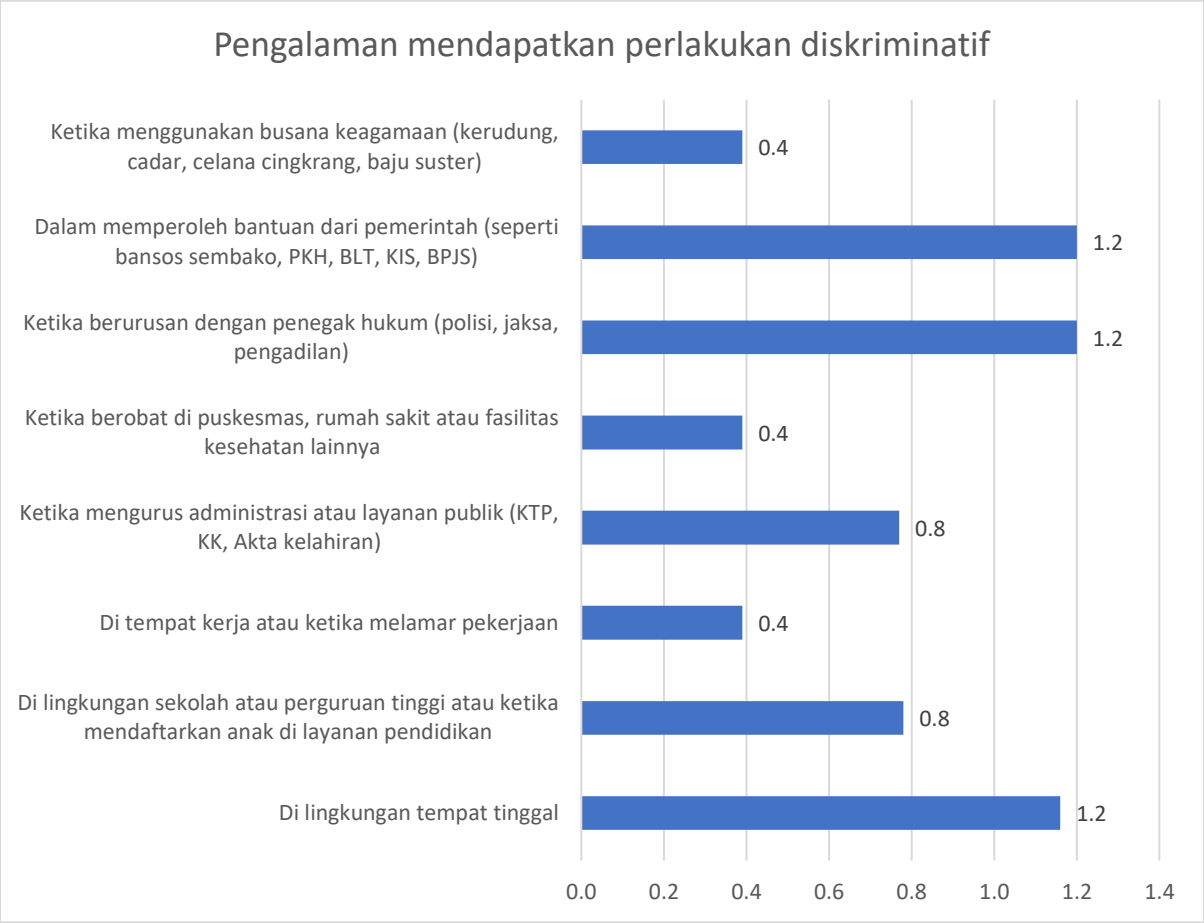

Disamping itu, untuk mengidentifikasi pengalaman diskriminasi yang dialami oleh masyarakat, responden juga ditanyakan tentang kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam melaksanakan ibadah, mengenakan symbol keagamaan dan mencari makanan. Table 1 menggambarkan bahwa lebih dari 97% responden melaporkan bahwasanya responden tidak memiliki kesulitan bahkan tidak ada satupun responden yang melaporkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah di lingkungan masing-masing. Responden yang melaporkan kesulitan paling banyak terkait mengenakan simbol/ekspresi keagamaan, seperti dalam berpakaian, pengunaan atribut, dsb. di tempat umum sejumlah 2.4 %.

Tabel 1: Kesulitan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari

Pernyataan	**Sangat Sulit**	**Sulit**	**Mudah**	**Sangat Mudah**
Melaksanakan ibadat di lingkungan Bapak/Ibu tinggal	0.0	0.0	59.5	40.5
Melaksanakan ibadat ketika orang lain melaksanakan perayaan hari besar keagamaan	0.0	1.6	69.7	28.8

Mengenakan simbol/ekspresi keagamaan, seperti dalam berpakaian, pengunaan atribut, dsb. di tempat umum	0.4	2.0	72.6	25.1
Mencari makanan yang baik menurut keyakinan Bapak/Ibu	0.0	1.2	66.0	32.8

Situasi Rukun di Masyarakat Berdasarkan Indikator Moderasi Beragama

Komitmen Kebangsaan

Kesetiaan dan penerimaan pada consensus bernegara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah pilar utama dalam moderasi beragama. Para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai jalan tengah atas desakan menjadikan Indonesia menjadi negara agama atau negara sekuler. Negara Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama sekaligus bukan negara sekuler tetapi negara Pancasila merupakan negara modern yang tetap menjunjung tinggi agama. Disamping itu, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang berdasarkan keragaman ras, suku, agama dan budaya dalam Bhineka Tunggal Ika dan komitmen terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945 dan regulasi di bawahnya adalah bagian dari komitmen kebangsaan.

Ada tiga kelompok indikator yang digunakan untuk mengukur komitmen kebangsaan. Hasil alpha test untuk ketiga kelompok indikator tersebut adalah 0.754 yang menunjukkan bahwa secara statistik indikator-indikator yang digunakan adalah reliabel yang menandakan keajegan pengukuran. Suatu indikator dapat dikatan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Kelompok pertama adalah persepsi responden tentang seberapa penting peraturan perundang-undangan dan Pancasila serta partisipasi dalam pilkada dan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gambar 13 menggambarkan bahwa mayoritas reponden (lebih dari 95%) menganggap penting menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat dan berpartisipasi dalam pilkada dan pemilu. Hampir 99% responden menganggap penting dan sangat penting menjadikan Pancasila sebagai landasan hidup dalam bernegara. Disamping itu Hampir 95% responden berpendapat bahwa Pancasila dan UUD191945 adalah yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai bangsa.

Gambar 13: Persepsi responden tentang seberapa penting peraturan perundang-undangan dan Pancasila serta partisipasi dalam pilkada dan pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

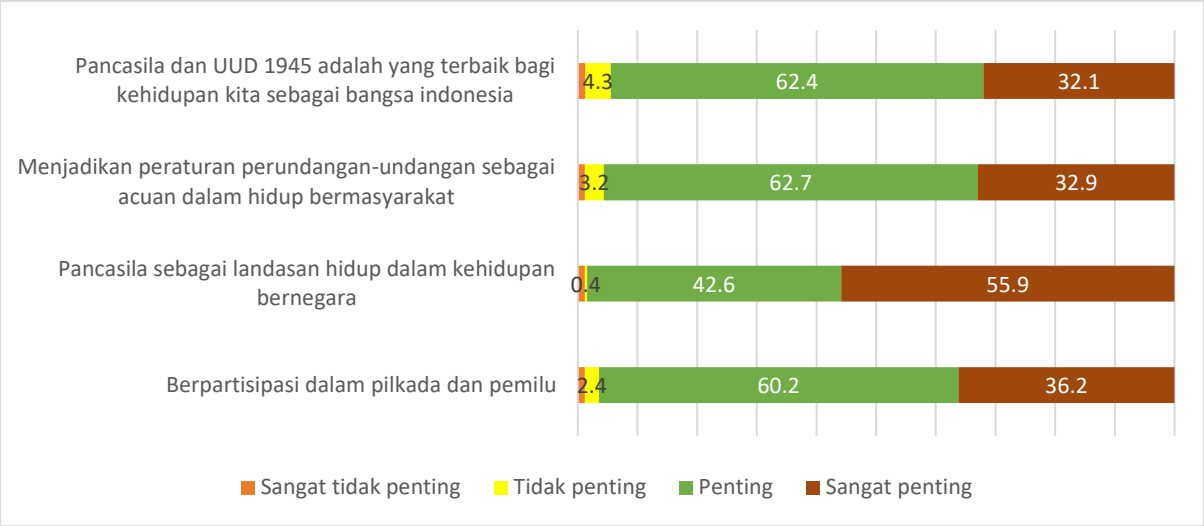

Kelompok yang kedua adalah pernyataan negatif atau ketidaksetujuan atas beberapa pernyataan seperti pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sistem yang *thogut* atau sesat, HAM tidak perlu dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan Pancasila dan UUD 1945 tidak cocok karena bertentangan dengan ajaran agama. Gambar 14 mendeskripsikan bahwasanya mayoritas respnden (lebih dari 90 %) tidak setuju atas pernyataan-peryataan tersebut. Responden yang tidak setuju dapat diartikan bahwasanya komitmen kebangsaannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan responden yang setuju. Responden yang setuju dan sangat setuju tidak menjadikan HAM sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat adalah yang paling banyak sejumlah hampir 10 %. Sejumlah kecil responden (dibawah 4%) setuju dan sangat setuju pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sistem yang sesat/thogut.

Gambar 14: Ketidaksetujuan atas pernyataan negatif terkait dengan Pancasila dan UUD 1945

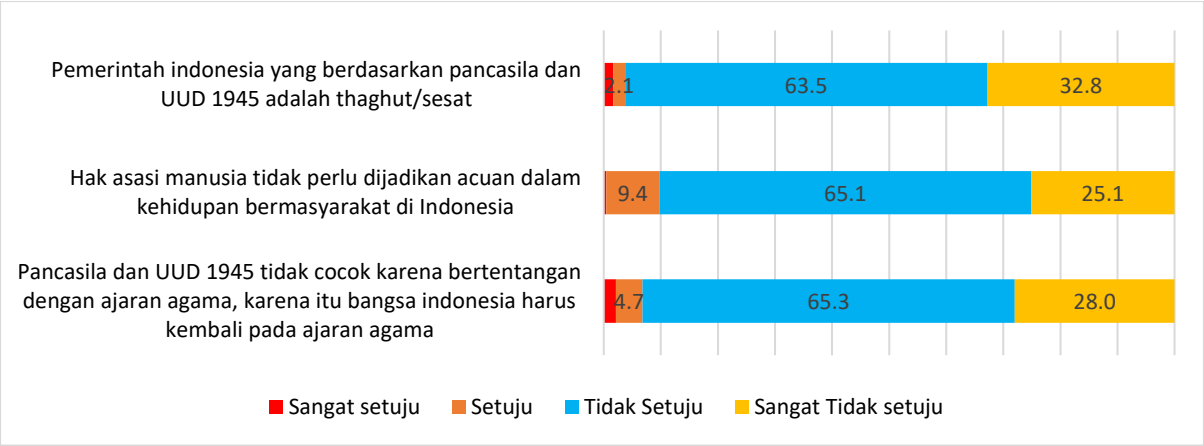

Indikator yang ketiga adalah kesediaan menyelesaikan masalah dengan penganut agama lain melalui jalur hukum. Responden yang tidak bersedia dan sangat tidak bersedia menyelesaikan masalah dengan penganut agama lain melalui jalur hukum cukup tinggi jika dibandingkan dengan indikator-indikator yang lain. Gambar 15 menggambarkan bahwa 31.6 % responden tidak setuju dan 3.6 % sangat tidak setuju menyelesaikan masalah melalui jalur hukum jika mempunyai masalah dengan penganut agama lain. Ketaatan terhadap konstitusi dan peraturan-peraturan pemerintah termasuk menyelesaikan masalah sosial keagamaan melalui jalur hukum adalah salah satu indikator komitmen kebangsaan yang dirumuskan oleh kementerian agama. Oleh karena itu aspek komitmen kebangsaan yang terkait menjadikan konstitusi dan hukum sebagai acuan dalam menyeesaikan masalah perlu diperkuat ke masyarakat sehingga aksi-aksi intoleransi dan kekerasan atas nama agama bisa diminimalisir dengan selalu mengacu kepada ketaatan pada hukum yang berlaku.

Gambar 15: Kesedian responden menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah dengan penganut agama lain

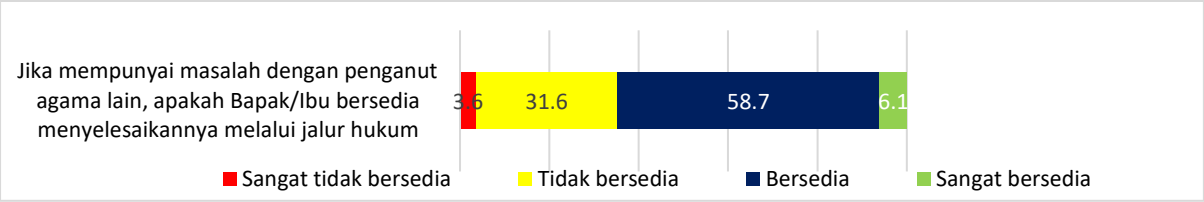

Berdasarkan ketiga kelompok indikator tersebut dapat dirumuskan indeks komitmen kebangsaan dengan skala 1-4 dengan kategori komitmen kebangsaan yang sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Gambar 16 menjelaskan bahwa lebih separuh dari responden (58.9 %) mempunyai komitmen kebangsaan yang tinggi, diikuti oleh 20.5 % responden yang memiliki komitmen kebangsaan dalam kategori sangat tinggi. Hanya sedikit responden yang memiliki komitmen kebangsaan yang sedang (13.2 %), rendah (4.7 %) dan sangat rendah (2.7 %). Rata-rata skor indeks komitmen kebangsaan dari semua responden adalah 3.02 dalam skala 1-4 yang dapat diartikan bahwa komitmen kebangsaan masyarakat di kedua desa tersebut dalam kategori tinggi atau baik sekali.

Kuatnya komitmen kebangsaan tersebut menjadi modal yang sangat baik dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Namun salah satu komponen dalam komitmen bernegara yang perlu dikuatkan adalah perlunya penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, aturan hukum yang berlaku perlu dijadikan acuan termasuk dalam penyelesaian masalah dengan penganut agama lain sehingga setiap persoalan

dengan penganut agama lain tidak diselesaikan dengan cara kekerasan tetapi harus mengedepankan hukum yang berlaku.

Gambar 15: Indeks komitmen kebangsaan dengan skala 1- 4

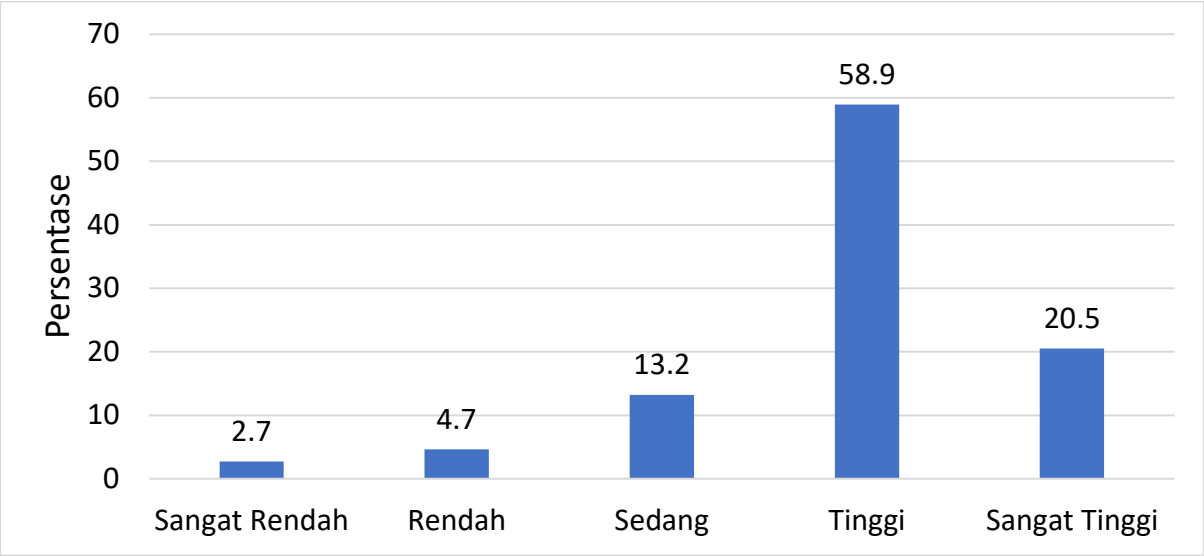

Toleransi

Indikator yang kedua moderasi beragama adalah toleransi. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menghormati dan menerima perbedaan yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Toleransi menjadi pilar penting dalam berdemokrasi dan hidup dalam masyarakat majemuk. Demokrasi akan dapat berjalan dengan baik ketika masyarakat memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya dan menyampaikan pendapatnya.

Ada 7 indikator yang digunakan untuk mengukur sikap tolerasi masyarakat apakah masyarakat keberatan atau tidak keberatan untuk hidup bertetangga, perayaan keagamaan agama lain, berteman, pemakaman jenazah, membuka uasaha, mendirikan rumah ibadah dan pemimpin dari agama lain. Hasil alpha test untuk ketujuh indikator tersebut adalah 0.922 dan mendekati angka satu yang menunjukkan bahwa secara statistik indikator-indikator yang digunakan adalah sangat reliabel. Suatu indikator dapat dikatan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Tabel 3: Indikator toleransi terhadap penganut agama lain

Pernyataan	Sangat keberatan	Keberatan	Tidak Keberatan	Sangat tidak keberatan
Hidup bertetangga dengan penganut agama lain	0.0	0.0	63.4	36.6
Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Bapak/Ibu	0.0	1.2	72.8	26.1
Anak-anak Bapak/Ibu bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain	0.0	0.4	72.5	27.1
Apabila pemeluk agama lain meninggal, jenazahnya boleh dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan Bapak/Ibu tinggal	0.0	0.4	69.9	29.7
Penganut agama lain membangun tempat usaha di sekitar tempat tinggal Bapak/Ibu	0.0	1.2	79.5	19.4
Penganut agama lain mendirikan rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Bapak/Ibu	0.0	4.3	75.9	19.8
Penganut agama lain menjadi pemimpin (bupati, walikota, kepala desa dst) di tempat tinggal Bapak/ibu	0.8	9.3	70.8	19.1

Tabel 3 menjelaskan bahwasanya toleransi masyarakat sangat tinggi dimana mayoritas responden (90 % keatas) tidak keberatan dan sangat tidak keberatan dengan semua indikator toleransi yang ditanyakan. Indikator untuk hidup bertetangga dengan penganut agama lain misalnya menunjukkan bahwasanya 100 % masyarakat tidak keberatan bertetangga dengan penganut agama lain. Hampir 100 % responden juga bersikap tidak keberatan ketika Anak-anak mereka bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain dan jenazah pemeluk agama lain boleh dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungan tempat tinggal. Namun persentase masyarakat yang keberatan penganut agama lain mendirikan rumah ibadah dan menjadi pemimpin cukup tinggi jika dibandingkan dengan indikator yang lain. Sekitar 4.3 % responden keberatan penganut agama lain mendirikan rumah ibadah dan sekitar 10 % responden keberatan jika dipimpin oleh penganut agama lain. Hal tersebut mencerminkan bahwa salah satu potensi konflik antar umat beragama adalah pendirian rumah ibadah dan suksesi kepemimpinan. Angka tersebut menjadi potret dari tingginya angka penolakan pendirian rumah ibadah di berbagai daerah. Sikap terhadap pemimpin yang berbeda agama juga sering sekali dipergunakan dalam politik praktis dan menguatnya politik identitas di tengah masyarakat. Politik identitas yang berkembang sejak pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan Pilpres tahun 2019 mengakibatkan masyarakat semakin terpolarisasi. Polarisasi dalam masyarakat sering diikuti dengan penyebaran ujaran kebencian (hate-speech) atas nama SARA. Ujaran kebencian tersebut masuk ke ruang-ruang politik praktis yang membuat polarisasi dalam masyarakat semakin mengkhawatirkan.

Penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap perbedaan dalam indikator-indikator toleransi tersebut tergambarkan dalam indeks skor toleransi dengan skala 1-4. Gambar 16 menggambarkan bahwasanya indeks toleransi responden tidak ada yang rendah. Sikap toleransi maayoritas responden (68 %) berada di level tinggi dan 27.4 % dapat dikategorikan

sangat tinggi. Hanya 4.6 % responden saja yang memiliki sikap toleransi yang dalam kategori sedang.

Gambar 16: Indeks toleransi masyarakat

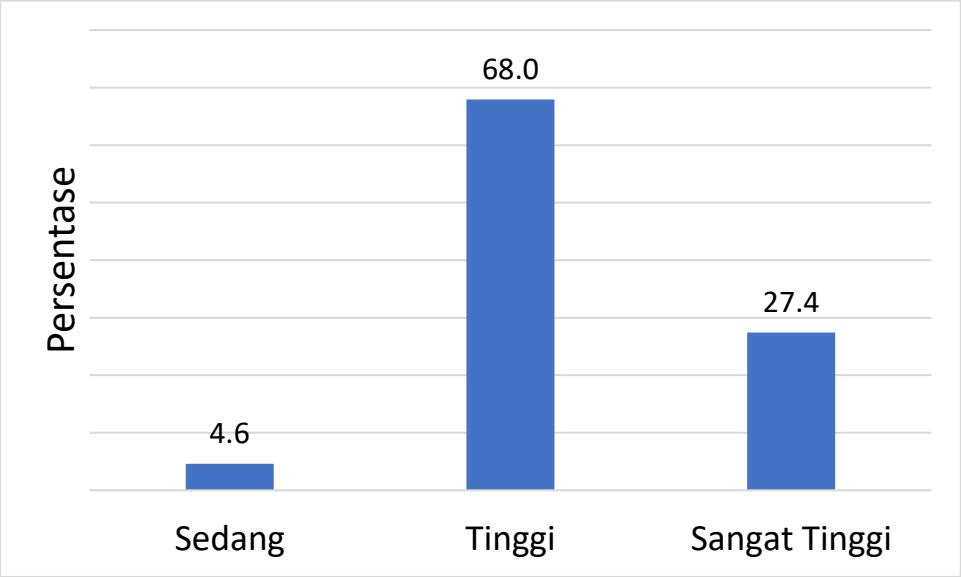

Skor rata-rata untuk sikap toleransi adalah 3.2 dari skala maksimal 4 yang menunjukkan sikap toleransi masyarakat dalam kategori tinggi di kedua desa tersebut. Ini menjadi modal yang sangat bagus mengingat dua desa yang diteliti adalah desa yang multikultur dari sisi agama, bahkan Kalurahan Baleharjo mendapatkan penghargaan atau dicanagkan sebagai desa sadar kerukunan dari Kementerian Agama. Di kedua desa tersebut, masyarakat sudah hidup rukun dan terbiasa hidup berdampingan. Bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah ibadahnya juga berdampingan seperti di desa Baleharjo dimana antara Masjid dan Gereja berdekatan, bahkan di sebuah halaman masjid, ada pohon beringin yang sering ditempatkan sesajen (Foto 2).

Foto 2: Pohon beringin di halaman masjid yang sering ditaruh sesajen

Anti-Kekerasan

Dimensi moderasi beragama yang ketiga adalah anti-kekerasan. Moderasi beragama menekankan pada ide/gagasan perubahan social yang dilakukan dengan cara anti kekerasan atas nama agama, baik kekerasan fisik maupun verbal. Ada dua kelompok indikator untuk mengukur sikap anti kekerasan. Hasil alpha test untuk kedua kelompok indikator tersebut adalah 0.833 yang menunjukkan bahwa secara statistik indikator-indikator yang digunakan adalah sangat reliabel yang ditunjukkann dengan keajegan pengukuran.

Table 4: Persentase persetujuan menggunakan kekerasan dalam berjihad dan menegakkan syariat islam

Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat tidak setuju
Apakah kekerasan menjadi salah satu bentuk jihad	1.2	2.0	59.3	37.5
Menegakkan syariat islam dengan paksaan	1.7	3.0	63.4	31.9

Kelompok pertama adalah persetujuan menggunakan kekerasan dalam berjihad dan menegakkan syariat islam. Tabel 4 menggambarkan mayoritas responden (lebih dari 95%) tidak setuju kekerasan menjadi salah satu bentuk jihad dan menggunakan kekerasaan dalam

melaksanakan syariat islam. Hal ini menunjukkan sikap anti-kekerasan di kedua desa tersebut sangat tinggi dan menjadi modal yang sangat baik dalam menjaga harmoni di kedua desa yang beragam tersebut.

Table 5: Persentase keinginan atau persetujuan untuk mendukung aksi kekerasan

Pernyataan	Sangat ingin	Ingin melakukan	Tidak Ingin	Sangat tidak ingin
Menandatangani petisi online/berkampanye di media untuk melarang simbol-simbol agama lain	0.4	1.6	74.4	23.6
Mengikuti demonstrasi/aksi protes menolak tempat ibadah dari aliran yang dianggap menyimpang	0.8	11.1	67.2	21.0
Memberikan sumbangan terhadap kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan	0.8	1.2	64.0	34.0
Menggunakan kekerasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar	0.8	1.6	60.1	37.5
Menyebarluaskan ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok/agama lain yang dianggap menyimpang/sesat	0.4	4.0	59.8	35.9
Mengusir orang yang dianggap mengikuti aliran sesat	2.4	32.1	46.6	18.9

Kelompok kedua adalah keinginan atau persetujuan untuk mendukung aksi kekerasan. Table 5 menjelaskan secara rinci persentase kecendrungan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap aksi kekerasan yang diukur dengan 8 indikator yaitu menandatangani petisi online/berkampanye di media untuk melarang simbol-simbol agama lain, mengikuti demonstrasi/aksi protes menolak tempat ibadah dari aliran yang dianggap menyimpang, memberikan sumbangan terhadap kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan, menggunakan kekerasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar, menyebarluaskan ajakan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok/agama lain yang dianggap menyimpang/sesat dan mengusir orang yang dianggap mengikuti aliran sesat. Selain indikator terkait aliran menyimpang, lebih dari 95% responden tidak ingin dan sangat tidak ingin melakukan atau mendukung kegiatan yang berkonotasi aksi kekerasan. Misalnya 98% responden menyatakan tidak ingin dan sangat tidak ingin untuk menandatangani petisi online/berkampanye di media untuk melarang simbol-simbol agama lain. Table 5 juga menjelaskan bahwa 98 % responden juga menyatakan ketidakinginannya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok-kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan. 97% responden juga menyatakan ketidakinginannya untuk menggunakan kekerasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar. Namun persentase responden yang menyatakan keinginannya untuk demonstrasi menolak dan mengusir kelompok yang dianggap menyimpang cukup tinggi. Misalnya hampir 12 % responden menyatakan keinginannya untuk mengikuti demonstrasi/aksi protes menolak tempat ibadah dari aliran yang dianggap menyimpang. Lebih dari sepertiga responden (34.5%) menyatakan keinginannya untuk mengusir orang yang dianggap mengikuti aliran sesat. Aksi demonstrasi menolak rumah

ibadah dan mengusir kelompok yang dianggap menyimpang sering sekali berujung dengan kekerasan dan pengrusakan.

Namun secara keseluruhan indeks anti kekerasan dari semua indikator tersebut menunjukkan bahwa Mayoritas responden memiliki sikap toleransi yang tinggi (57.5 %) dan dan sangat tinggi (25.6 %) dan hanya 1.6 % responden yang memiliki sikap anti-kekerasan yang rendah dan sangat rendah sebagimana tergambar dalam gambar 17. Skor rata-rata responden di dua desa yang diteliti dengan skala 1-4 adalah 3.1 yang menunjukkan secara umum masyarakat di kedua lokasi tersebut memiliki cara pandang anti kekerasan yang tinggi dan baik.

Gambar 17: Indeks Anti Kekerasan

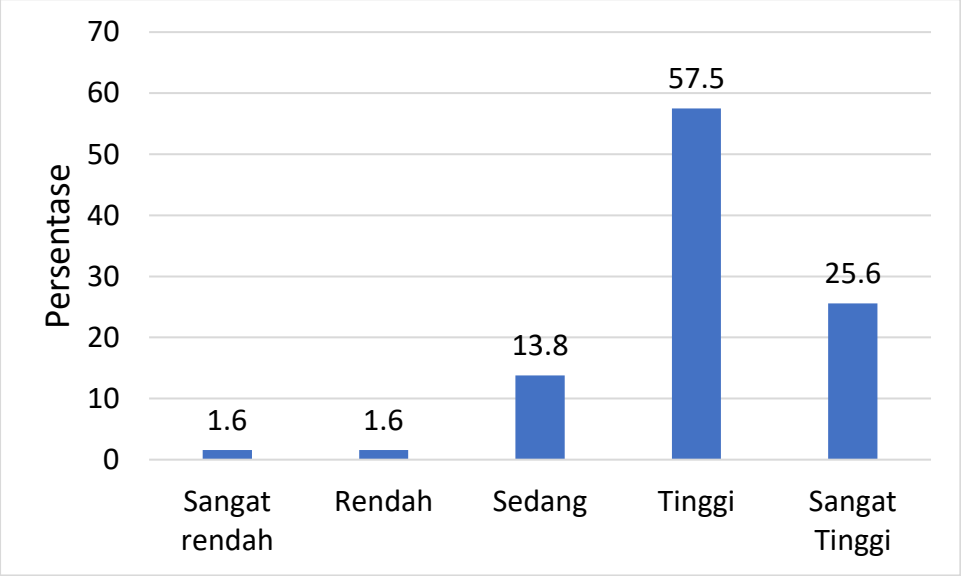

Akomodatif terhadap budaya lokal

Dimensi keempat dari moderasi beragama adalah akomodatif terhadap budaya local. Akomodatif terhadap budaya local adalah salah satu pilar utama moderasi beragama. Pada awal penyeberan islam di Indonesia, islam didakwahkan dengan damai dan mengakomodasi budaya local yang ada di Indonesia. Ada empat penyataan untuk mengukur sikap menerima budaya local sebagai kekayaan kultural masyarakat Indonesia yang meliputi kesediaan menerima sekelompok masyarakat yang melakukan nyadran, sedekah laut atau sedekah bumi, tahlilan dan kenduren dan serta ruwatan atau suronan. Kekayaan kultural tersebut adalah kekayaan kultural yang lebih banyak berada di pulau Jawa khususnya Yogyakarta karena lokasi penelitian ada di Yogyakarta. Hasil alpha test terhadap pernyataan-pernyataan tersebut adalah 0.939 yang menunjukkan bahwa secara

statistik indikator-indikator yang digunakan adalah sangat reliabel karena mendekati angka satu yang dapat diartikan dengan keajegan pengukuran. Table 6 menggambarkan bahwa mayoritas responden (96%) keatas tidak keberatan dan sangat tidak keberatan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial budaya seperti nyadaran, sedekah bumi, kenduren, suronan dan maulidnabi. Hal ini mengindikasikan masyarakat sangat akomodatif terhadap budaya local. Hal tersebut juga tercermin dari tradisi menaruh sesajen di sekitar pohon beringin di halaman masjid di desa Baleharjo sebelum melaksanakan rasulan yang dilaksanakan setiap tahun sebagai even budaya di tengah masyarakat. Memberikan sesajen tersebut sudah dilakukan turun temurun dan kegiatan rasulan melibatkan setiap agama yang ada di desa Baleharjo.

Tabel 6: Persentase persetujuan pelaksanaan kekayaan kultural masyarakat Indonesia (khususnya di jawa)

Pernyataan	**Sangat keberatan**	**Keberatan**	**Tidak Keberatan**	**Sangat tidak keberatan**
Sekelompok masyarakat melakukan nyadran	0.4	2.7	75.9	21.0
Sekelompok masyarakat melakukan sedekah laut/sedekah bumi	0.4	2.8	76.1	20.8
Sekelompok masyarakat melakukan Tahlilan/ Maulid/mujahadah/kenduren	0.8	0.8	71.7	26.7
Sekelompok masyarakat melakukan Ruwatan/suronan/sekaten	0.8	1.6	75.3	22.3

Gambar 18: Indeks akomodatif terhadap praktek budaya lokal

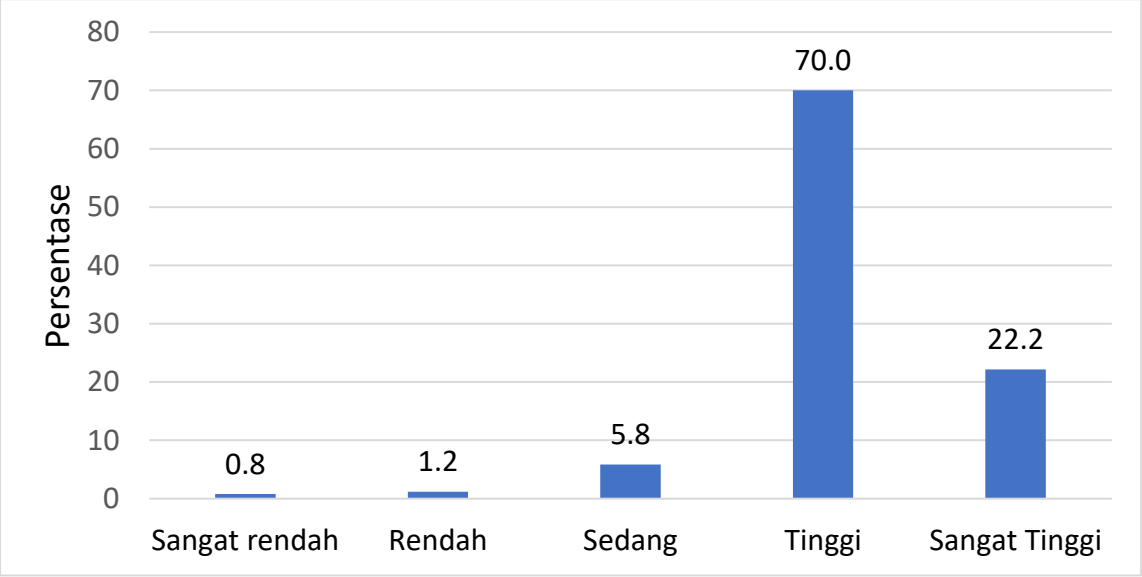

Dari empat indikator tersebut selanjutnya dibuat indeks tingkat sikap akomodatif terhadap budaya local yang dikelompokkan menjadi 5 yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Gambar 18 menggambarkan mayoritas resonden (70 %) dapat dikelompokkan memiliki tingkat akomodatif terhadap budaya local yang tinggi, diikuti oleh responden yang memiliki sikap akomodatif yang tinggi (22.2%), 5.8 % responden yang memiliki sikap akomodatif yang sedang, 1.2 % memiliki sikap akomodatif yang rendah dan 0.8 % sangat rendah. Rata-rata skor sikap akomodatif terhadap budaya local adalah 3.1 dari skala maksimal 4 yang menunjukkan rata-rata-sikap akomodatif terhadap budaya local dalam kategori tinggi atau baik.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Beragama Yang Moderat

Untuk menganalisis factor yang berkolerasi dengan sikap beragama yang moderat, peneliti menggunakan bivariate analisis dengan ANOVA atau F-Test. Dari hasil analisa bivariate analisis tersebut ditemukan bahwasanya jenjang pendidikan dan keaktipan dalam organisasi/perkumpulan keagamaan atau kegiatan keagamaan berkorelasi positif dengan sikap beragama yang moderat, sedangkan factor agama meskipun secara umum rata-rata skor sikap moderat responden muslim lebih rendah namun secara statistic tidak berbeda secara significant dengan penganut agama lain.

Gambar 19: Moderasi beragama berdasarkan jenjang pendidikan

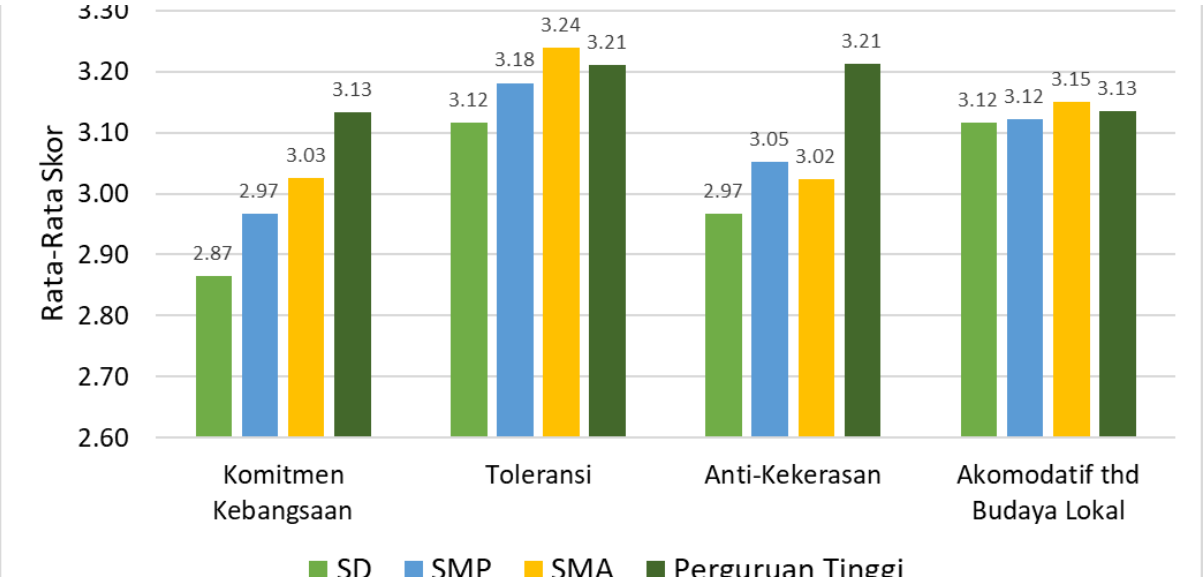

Gambar 19 menggambarkan bahwasanya secara umum semakin tinggi pendidikan responden semakin tinggi skor rata-rata sikap moderasi beragama dalam semua dimensi atau indicator moderasi beragama. Misalnya, rata-rata skor sikap komitmen kebangsaan responden

yang memiliki jenjang Pendidikan SD adalah 2.87, meningkat menjadi 2.97 untuk responden yang menamatkan jenjang pendidikan SMP dan meningkat menjadi 3.03 bagi respnden yang menamatkan Pendidikan SMA atau sederajat dan rata-rata skor tertinggi 3.13 dimiliki oleh respnden yang menamatkan perguruan tinggi.

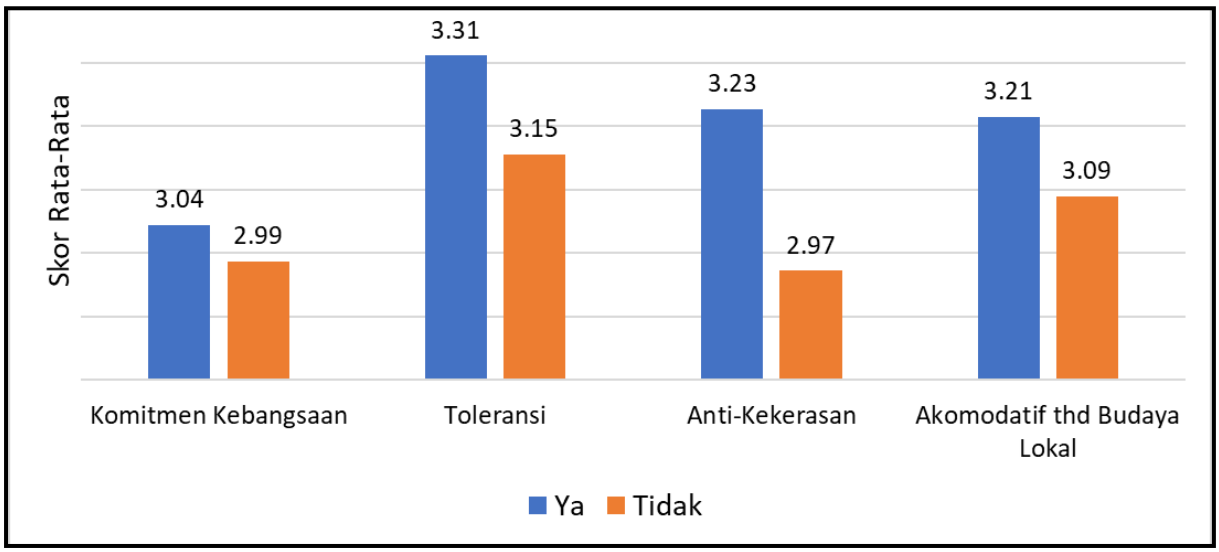

Gambar 20: Moderasi beragama berdasarkan keaktifan dalam perkumpulan keagamaan

Keaktifan dalam perkumpulan keagamaan seperti kelompok pengajian dan perkumpulan jemaat gereja sangat berkorelasi dengan sikap beragama yang moderat di semua dimensi dan indicator moderasi beragama sebagaimana digambarkan di gambar 20. Responden yang aktif di perkumpulan keagamaan memiliki rata-rata skor toleransi yang lebih tinggi yaitu 3.31 jika dibandingkan dengan responden yg tidak aktif yang memiliki rata-rata skor toleransi 3.15.

Kesimpulan

Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan dan berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama menjadi dasar utama perlunya cara pandang yang lebih moderat dalam beragama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis situasi kerukunan, pengalaman diskriminasi berbasis agama dan tingkat kesukaan terhadap kelompok tertentu serta menjelaskan sikap dan cara pandang keberagamaan masyarakat berdasarkan indikator moderasi beragama yang sudah dikembangkan Kementerian Agama yang mencakup empat dimensi yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya local.

Penelitian ini menemukan bahwa secara umum responden yang mengalami diskriminasi karena agama yang dianutnya sangat sedikit dibawah 1.5 %. Diskriminasi yang paling tinggi dialami oleh responden dalam memperoleh bantuan dari pemerintah, ketika berurusan dengan penegak hukum dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing 1.2 %. Diskriminasi yang paling sedikit dilaporkan responden (0.4 %) adalah ketika menggunakan busana keagamaan, ketika berobat di layanan kesehatan dan ditempat kerja atau ketika melamar pekerjaan. Disamping itu, lebih dari 97% responden melaporkan bahwasanya responden tidak memiliki kesulitan bahkan tidak ada satupun responden yang melaporkan kesulitan dalam melaksanakan ibadah di lingkungan masing-masing. Responden yang melaporkan kesulitan paling banyak terkait dengan mengenakan simbol/ekspresi keagamaan, seperti dalam berpakaian, pengunaan atribut, dsb. di tempat umum sejumlah 2.4 %. Sedikitnya responden yang mengalami diskriminasi berbasis agama dan kesulitan dalam melaksanakan ibadahnya menunjukkan bahwasanya Indonesia khususnya kedua desa yang diteliti termasuk negara atau kalurahan yang sangat baik dalam mengelola perbedaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik atau gesekan dalam masyarakat sangat minim. Namun, 10.2 % responden melaporkan di desa mereka pernah terjadi gesekan dalam masyarakat, 2.7 % responden melaporkan beberapa kali terjadi dan 0.4 % menyatakan sering terjadi. Ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu dapat menjadi benih-benih konflik dan sering sekali ketidaksukaan tersebut berangkat dari stereotype atau asumsi tentang kelompok tersebut. Ada enam kelompok yang dibawah nilai rata-rata di angka 5 dari skala 0-10 yaitu kelompok ahmadiah, syiah, wahabi, ateis, komunis dan LGBT. Rata-rata dibawah 5 dapat diartikan adalah kelompok yang kurang disukai. Kelompok LGBT dan ateis adalah kelompok yang paling tidak disukai dengan nilai rata-rata dibawah 1 sedangkan kelompok wahabi dan komunis juga termasuk yang kurang disukai dengan skor rata-rata di bawah dua. Kelompok selanjutnya yang kurang disukai adalah kelompok syiah dan ahmadiyah dengan nilai rata-rata 3.6 dan 4.6 secara berurutan. Angka tersebut dapat merefleksikan tingginya sikap intoleransi terhadap kelompok syiah dan ahmadiyah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh PPIM (2016) terhadap guru Pendidikan agama islam menemukan bahwa 80% responden tidak bersedia jika diminta menampung penganut Syiah dan Ahmadiyah yang diusir dari kampung halamannya. Sikap ini menunjukkan kelompok yang tidak disukai dapat terekslusi secara social dan terdiskriminasi dari akses dalam mendapatkan bantuan dari anggota masyarakat yang lain karena identitas keagamaan yang melekat pada diri mereka.

Terkait dengan komitmen kebangsaan sebagai salah satu indicator penting dalam beragama secara moderat, penelitian ini menemukan bahwa rata-rata skor indeks komitmen kebangsaan dari semua responden adalah 3.02 dalam skala 1-4 yang dapat diartikan bahwa komitmen kebangsaan masyarakat di kedua desa tersebut dalam kategori tinggi atau baik sekali. Namun salah satu indicator komitmen kebangsaan yang perlu diperkuat adalah penyelesaian masalah melalui jalur hukum jika terjadi persoalan dengan agama yang lain sehingga persoalan dengan penganut agama lain tidak diselesaikan dengan cara kekerasan. Penelitian ini menemukan bahwa 31.6 % responden tidak setuju dan 3.6 % sangat tidak setuju menyelesaikan masalah melalui jalur hukum jika mempunyai masalah dengan penganut agama lain.

Penelitian ini juga menemukan bahwa skor rata-rata untuk sikap toleransi adalah 3.2 dari skala maksimal 4 yang menunjukkan sikap toleransi masyarakat dalam kategori tinggi. Namun, sekitar 4.3 % responden keberatan penganut agama lain mendirikan rumah ibadah dan sekitar 10 % responden keberatan jika dipimpin oleh penganut agama lain. Hal tersebut mencerminkan bahwa salah satu potensi konflik antar umat beragama adalah pendirian rumah ibadah dan suksesi kepemimpinan sebagaimana kasus-kasus yang sering muncul di Indonesia.

Terkait sikap anti kekerasan, skor rata-rata responden adalah 3.1 yang menunjukkan secara umum masyarakat di kedua lokasi tersebut memiliki cara pandang anti kekerasan yang tinggi. 97% responden juga menyatakan ketidakinginannya untuk menggunakan kekerasan dalam melaksanakan amar makruf nahi munkar. Namun persentase responden yang menyatakan keinginannya untuk demonstrasi menolak dan mengusir kelompok yang dianggap menyimpang cukup tinggi. Misalnya hampir 12 % responden menyatakan keinginannya untuk mengikuti demonstrasi/aksi protes menolak tempat ibadah dari aliran yang dianggap menyimpang. Lebih dari sepertiga responden (34.5%) menyatakan keinginannya untuk mengusir orang yang dianggap mengikuti aliran sesat. Disamping itu, rata-rata skor sikap akomodatif terhadap budaya local adalah 3.1 yang menunjukkan rata-rata-sikap akomodatif terhadap budaya local dalam kategori tinggi.

Dari hasil analisa bivariate analisis menggunakan ANOVA atau F-Test ditemukan bahwasanya jenjang pendidikan dan keaktipan dalam organisasi/perkumpulan keagamaan atau kegiatan keagamaan berkorelasi positif dengan sikap beragama yang moderat. Semakin tinggi jenjang pendidikan responden semakin tinggi skor rata-rata sikap moderasi beragama

di semua dimensi atau indicator moderasi beragama. Responden yang aktif di perkumpulan/organisasi keagamaan memiliki sikap moderasi beragama yang lebih tinggi

Daftar Pustaka.

Antara. (2018). Budi Gunawan Ungkap Temuan BIN: 39 Persen Mahasiswa Radikal *Tempo*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/1084027/budi-gunawan-ungkap-temuan-bin-39-persen-mahasiswa-radikal/full&view=ok

Az, A. S., & Adnan, M. (2020). Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Journal of Politic and Government Studies, 9*(03), 31-40.

Babbie, E. R. (2015). *The practice of sosial research*: Nelson Education.

Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of political economy, 70*(5, Part 2), 9-49.

Cao, J., & Rammohan, A. (2016). Sosial capital and healthy ageing in Indonesia. *BMC Publik Health, 16*(1), 631.

De Vaus, D. A. (2002). *Sosial surveys* (Vol. 2): Sage.

Dzulfaroh, A. n. (2019). Indeks Kerukunan Umat Beragama 2019 Versi Kemenag: Papua Barat Tertinggi, Aceh Terendah. *Kompas*. Retrieved from https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/15/191200965/indeks-kerukunan-umat-beragama-2019-versi-kemenag--papua-barat-tertinggi?page=all

Indikator, P. I. (2020). *Indeks kerukunan umat beragama di indonesia*. Paper presented at the Religious policy forum: moderasi beragama, kerukunan umatberagama dan FKUB, Jakarta.

Mincer, J. (1962). Labor force participation of married women: A study of labor supply. In *Aspects of labor economics* (pp. 63-105): Princeton University Press.

Neuman, L. W. (2011). *Sosial research methods: qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.

Noorbani, M. A. (2019). KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG SAWAH KECAMATAN PONDOK MELATI KOTA BEKASI. *Al-Qalam, 25*(2), 285-308.

Panggabean, S. R., Alam, R. H., & Ali-Fauzi, I. (2010). The Patterns of Religious Conflict in Indonesia (1990-2008). *Studia Islamika, 17*(2).

Schultz, T. W. (1975). The value of the ability to deal with disequilibria. *Journal of economic literature, 13*(3), 827-846.

Siisiainen, M. (2003). Two concepts of sosial capital: Bourdieu vs. Putnam. *International Journal of Contemporary Sociology, 40*(2), 183-204.

Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living*: Univ of California Press.

Varshney, A., Tadjoeddin, M. Z., & Panggabean, R. (2004). *Patterns of Collective violence in Indonesia, 1990-2003*: Citeseer.

Wahid, Y. Z. (2014). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi, 2014:"Utang" Warisan Pemerintah Baru. *Jakarta: The Wahid Institute. Tersedia secara online juga di: http://wahidinstitute. org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 3 Agustus 2018]*.